



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK**



Rencana Pengelolaan Ekosistem Mangrove di wilayah pesisir IKN  
**Pembangunan Mangrove Center dan Rehabilitasi Mangrove**

Balikpapan, 4 Desember 2022

An aerial photograph showing a dense mangrove forest. The forest is composed of numerous green trees growing out of a network of light blue and grey waterways. The patterns created by the water channels through the trees resemble a complex, organic map. A small, distinct area of brownish land or cleared area is visible within the green forest. The overall scene is a mix of natural textures and colors.

# OUTLINE

**1** Arah Kerja BSILHK  
2022–2024

---

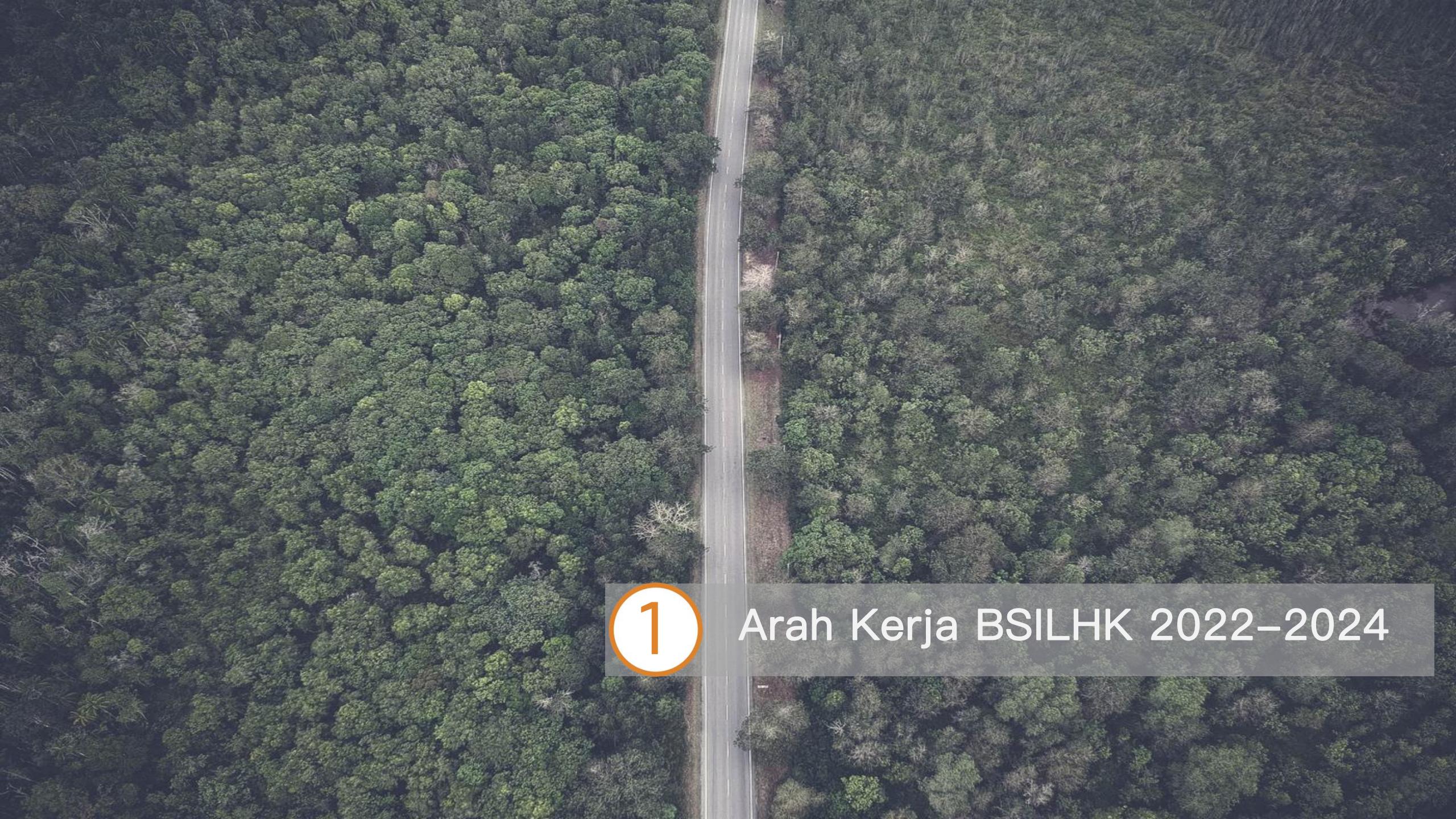
**2** Standar  
Pembangunan IKN

---

**3** Pembangunan World  
Mangrove Center

---

**4** Rekomendasi

An aerial photograph showing a two-lane asphalt road running vertically through a dense, green tropical forest. The road has white dashed lines and is flanked by lush vegetation. A small clearing or dirt path is visible on the right side of the road.

1

Arah Kerja BSILHK 2022–2024

# AGENDA PRIORITAS BSILHK 2022 – 2024

Arah kebijakan BSILHK selaras dengan arah kebijakan KLHK  
& terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goal's (SDG's)*.

Arah strategis Kementerian LHK  
sebagai acuan satu vektor kerja Badan Standardisasi 2030 antara lain:



Undang–Undang  
Cipta Kerja



FOLU Carbon Net  
Sink 2030



Ibu Kota Negara–IKN



Ekonomi  
Sirkular



2

## STANDAR PEMBANGUNAN IKN

# HIGHLIGHT – STANDAR LHK DALAM PEMBANGUNAN IKN



## Pra/Konstruksi IKN

1. Standar Mitigasi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan
2. Standar Pemantauan Lingkungan di Pembangunan Pelabuhan
3. Standar Mitigasi Dampak untuk Kegiatan Cut and Fill/Cut and Fill Lahan bagi Pembangunan Infrastruktur IKN
4. Standar Pengembangan Kriteria Teknologi Pengelolaan Limpasan Air Hujan
5. Standar Pembangunan dan Pengelolaan Koridor Satwa Alami (Eco-Bridge) untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Tinggi
6. Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
7. Standar Pemanfaatan Kayu untuk Komponen Bangunan Rumah Dan Energi Terbarukan Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
8. Standar Penebangan untuk Ibu Kota Nusantara Untuk Usaha/ Kegiatan Risiko Menengah Rendah
9. Standar Bibit untuk Lansekap Perkotaan untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
10. Standar Pengelolaan Persemaian Modern untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
11. Standar Mitigasi Dampak pembangunan infrastruktur Bangunan Gedung

# HIGHLIGHT – STANDAR LHK DALAM PEMBANGUNAN IKN

## Standar Makro IKN

1. Standar Restorasi Hutan Tropika Basah

## Pasca Konstruksi IKN

1. Standar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Wilayah IKN untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
2. Standar Pengelolaan Sampah Modern di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)
3. Standar Konservasi Tanah dan Air untuk Pengendalian Potensi Banjir Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
4. Standar Mitigasi Bencana Tanah Longsor untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
5. Standar Pengelolaan Bahan Bakar Dalam Rangka Pengendalian Karhutla untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
6. Standar Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Lahan Dalam Rangka Pengendalian Karhutla
7. Standar Penilaian Desa Siaga Api Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah



## HIGHLIGHT – STANDAR LHK DALAM PEMBANGUNAN IKN



19 standar ini adalah **standar tunggal yang dapat diaplikasikan oleh pemrakarsa**. Dampak komulatif secara lanskap akan dikaji lewat KLHS dan AMDAL terpadu.



Sebanyak 19 standar tersebut **akan terus diujiterapkan sampai dengan tahun 2024**. Masing–masing koordinator dan pusat–pusat terus melakukan uji terap – sehingga di tahun 2022 *level of confidence* standar dapat meningkat signifikan sehingga dapat menjadi kontribusi konkret KLHK sebagai bahan refleksi kinerja KLHK 2022



Diharapkan standar IKN dapat menjadi **instrumen pengawasan penegakan hukum pada saatnya nanti**. Sampai dengan tahun 2024 – muatan–muatan standar terus ditanamkan dan melakukan penyesuaian–penyesuaian, serta uji terap standar terus dilakukan untuk proses penyempurnaan.

# BUKU STANDAR IKN BIDANG LHK



## 19 DOKUMEN STANDAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

EDISI KETIGA



BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2022

### PENGANTAR KEPALA BSILHK SEKILAS CALON IBU KOTA NUSANTARA

Ary Sudijanto,

Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ibu Kota Nusantara dirancang dengan konsep sebagai kota yang aman, modern, berkelanjutan dan berketeraan yang menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. unsur-unsur penting kota berkelanjutan tersebut antara lain mencakup:

- a. Mengelola sumberdaya secara tepat guna;
- b. Pemanfaatan sumberdaya air dan energi yang efisien;
- c. Pengelolaan sampah berkelanjutan;
- d. Lingkungan alam dan binaan yang sinergi dengan konsep kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75 persen kawasan hijau serta menyelimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun dan sistem sosial yang ada secara harmonis;

Salah satu asas pembentukan UU IKN adalah asas keselimbangan, keserasian dan keselarasan. Asas ini antara lain terkait dengan keselimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestari bentang alam yang ada dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Perilindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. Rencana Induk Ibu Kota Negara menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam Lampiran II UU IKN yang diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Presiden.

Ibu Kota Nusantara ini memiliki visi "Kota Berkelas Dunia untuk Semua" dengan unsur-unsurnya yang terkait dengan aspek lingkungan hidup dan kehutanan antara lain adalah selaras dengan alam, IKN dengan *Net Zero Emission*, Sirkular dan *Resilience*. Berdasarkan visi ini, Rencana Induk Ibu Kota Nusantara mensusajdi 8 prinsip dan 24 Indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators* -KPIs) seperti tercantum di dalam **Gambar 2**.



Gambar 1. Visi Ibu Kota Nusantara.

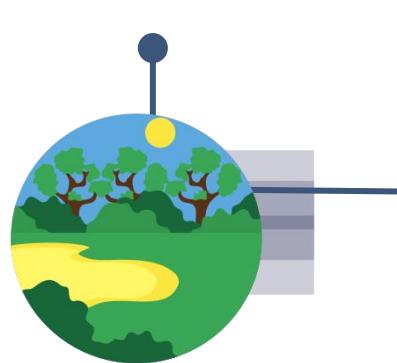
An aerial photograph showing a dense cluster of green mangrove trees growing out of a body of water with a teal or turquoise hue. The trees are arranged in several distinct, rounded clusters of varying sizes.

3

PEMBANGUNAN *WORLD MANGROVE  
CENTER*

# PENGELOLAAN MANGROVE DI INDONESIA

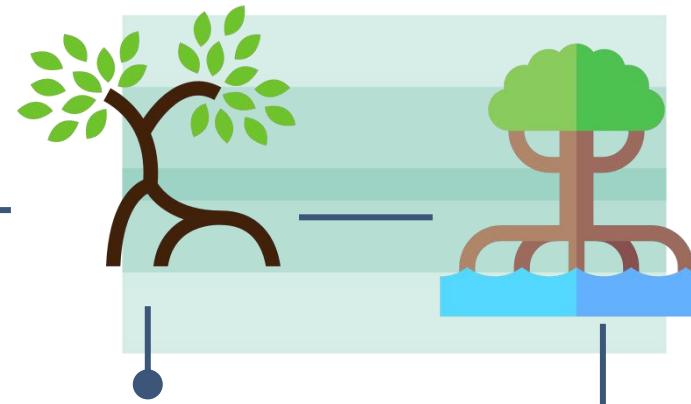
Mangrove berperan penting dalam penurunan emisi



Deforestasi banyak terjadi di kawasan mangrove

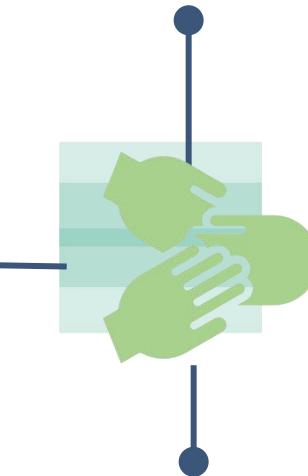


Rehabilitasi dan konservasi mangrove



Percepatan Rehabilitasi Mangrove 600.000 ha

Dukungan para pihak melalui **KOLABORASI**



- Rehabilitasi dan Konservasi
- Pengembangan Jasa Lingkungan
- Peningkatan Kapasitas masyarakat
- Pengembangan UMKM Mangrove
- **Pengembangan Pusat Informasi dan Teknologi**

# MILESTONE PENGELOLAAN MANGROVE

## 2021 – 2024 PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE

tercapainya rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar yang diperhitungkan dari jumlah luas seluruh lanskap yang telah dilakukan intervensi

## 2025 - 2027 PENGARUSUTAMAAN MANGROVE DALAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

terintegrasi pengelolaan mangrove dalam rencana pembangunan, rencana kegiatan dan usaha, dan terbangunnya unit-unit manajemen mangrove pada lokasi-lokasi tertentu

## 2028 - 2030 PENGELOLAAN MANGROVE LESTARI

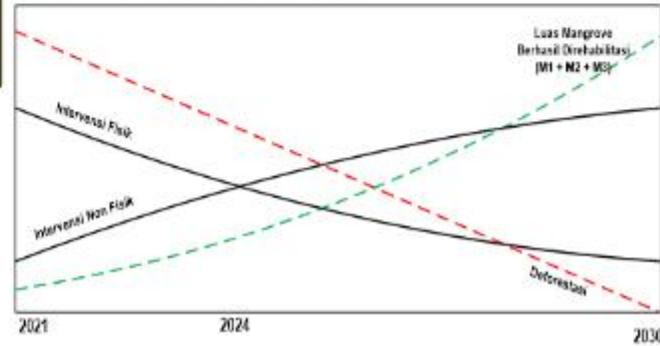
terbangunnya sistem pengelolaan mangrove lestari yang dipedomani oleh setiap unit manajemen dan menjadi dasar dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

2030

## MANGROVE NET SINK

meningkatnya daya dukung, produktivitas dan peran ekosistem mangrove dalam menjaga sistem penyanga kehidupan

## Indikator Roadmap



# DUKUNGAN PEMERINTAH JERMAN MELALUI FP VI DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

2021 – 2024

PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE  
(tercapainya rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar)

1. Penerapan Restorasi Opportunity Assessment Methodology (ROAM) di semua lokasi program rehabilitasi mangrove
2. Restorasi dari tambak melalui penembusan dinding tanggul, penanaman dan permudaan alami (Karang Gading, Mahakam)
3. Restorasi hidrologis melalui pekerjaan tanah tambak untuk mendapatkan kembali konektivitas dan salinitas (Karang Gading, Mahakam)
4. Melakukan pelatihan dan lokakarya tentang teknik restorasi mangrove
5. Patroli masyarakat di HCVF dan pendirian situs Ramsar baru (Sorong Selatan, Berau) untuk konservasi mangrove

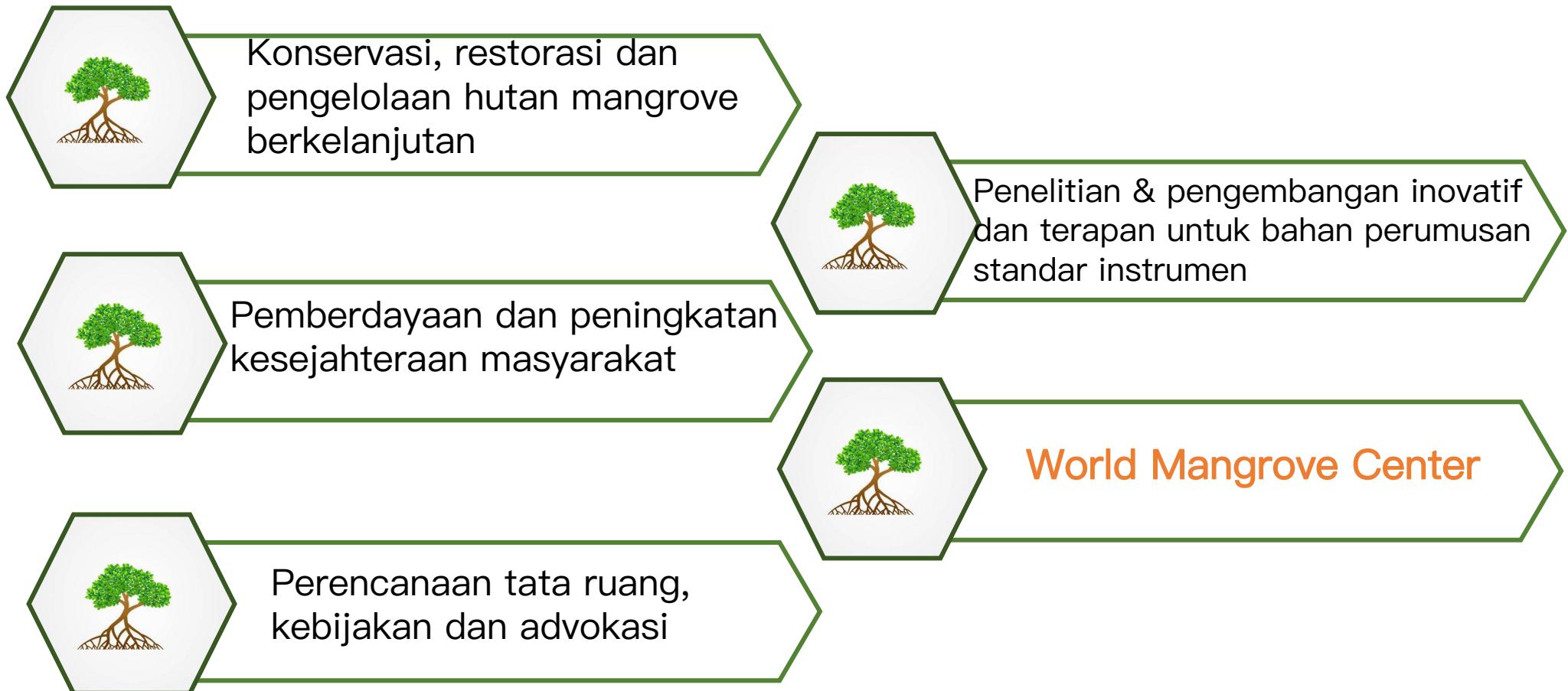
2025 – 2027

PENGARUSUTAMAAN MANGROVE DALAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

(terintegrasinya pengelolaan mangrove dalam rencana pembangunan, rencana kegiatan dan usaha, dan terbangunnya unit-unit manajemen mangrove pada lokasi-lokasi tertentu)

1. Identifikasi dan sosialisasi desa dan rumah tangga yang berpartisipasi di dalam lokasi proyek
2. Penetapan baseline sosial-ekonomi di semua lokasi lapangan
3. Memulai investasi masyarakat dengan cepat untuk mendukung desa-desa yang berpartisipasi (Mahakam, Sorong Selatan)
4. Mendorong dan mendukung BKSDA untuk membentuk lebih banyak kelompok tani (Karang Gading)
5. Melaksanakan PLUP di desa-desa terpilih dengan potensi perhutanan sosial (Karang Gading, Mahakam, Sorong Selatan)
6. Melakukan analisis pasar untuk peluang mata pencaharian yang teridentifikasi (semua lokasi)
7. Melakukan kelayakan menjadi potensi ekowisata (Mahakam, Sorong Selatan dan Berau)
8. Menetapkan skema dana bergulir dan peluang usaha mikro (misalnya terasi, kerupuk ikan, madu)
9. Mengembangkan peluang agroforestri (Karang Gading, Mahakam, Sorong Selatan)
10. Mengembangkan mekanisme perhutanan sosial
11. Atur kunjungan pertukaran (antara semua lokasi program; terutama antara Berau dan Mahakam)
12. Melakukan pelatihan dan lokakarya tentang pengembangan mata pencaharian dan pengelolaan keuangan tingkat desa
13. Pengembangan peraturan kelurahan/desa terkait pengelolaan mangrove berbasis kearifan tradisional (khususnya di Sorong Selatan)
14. Koordinasi dengan BAPPENAS dan BAPPEDA terkait perencanaan kawasan pesisir terpadu, zonasi dan tata guna lahan
15. Pengelolaan berkelanjutan: kemitraan sektor swasta/masyarakat untuk produksi gula aren Nypah (Mahakam)
16. Desain dan implementasi sekolah lapangan masyarakat untuk pengembangan kapasitas dan kesadaran lingkungan

# KEGIATAN FP VI



# TARGET DAN INDIKATOR KEGIATAN FP VI

Output	Indicator	Target Value
<b>Output 1:</b> Conservation, Restoration and Sustainable Management of Mangrove Forests through community action/- based processes	Indicator 1: 4000 ha ha of degraded land are sustainably rehabilitated/restorated in prioritized sites until the end of the project	Target value: 4000 ha of degraded land is sustainably rehabilitated
	Indicator 2: Saved greenhouse gases (t CO2e/year)	Target Value: Karang Gading: 2284,2 tCO2-e/year Mahakam Delta: 14005,4 tCO2-e/year Berau: 13573,6 tCO2-e/year Sorong City: 35,1 tCO2-e/year South Sorong: 3 tCO2-e/year
	Indicator 3: Emitted greenhouse gases (t CO2e/year)	not applicable (TBD)
	Indicator 4: 50,000 (ha) of protected or sustainably managed natural terrestrial ecosystems	Target Value: 50,000 ha
<b>Output 2:</b> Community Development and Livelihoods	Indicator 1: 5 new alternative gender-responsive actions (e.g.) low impact micro-and small livelihood enterprises established.	Target Value: 5 alternatives of the new gender-responsive livelihood strategies established
	Indicator 2: 66% of community groups comply with agreed upon management plans	Target Value: 66 %
	Indicator 3: 5 adaptation strategies for the indigenous/local population are incorporated in management plans and put into practice	Target Value: 5
	Indicator 4: Number of people who benefit from terrestrial resource protection measures in 70 villages	Target Value: (Number of people) in 70 villages
<b>Output 3:</b> Spatial Planning, Policy and Advocacy	Indicator 1: 5 local community development plans, including comprehensive spatial plans, endorsed at district level by BAPPEDA	-
<b>Output 4:</b> Innovative and applied Research and Development	Indicator 1: 5 applied research studies are developed and utilized for the design of mangrove conservation and restoration activities in demonstration sites.	-
<b>Output 5:</b> Establishment of WMC	The WMC is established according the previously agreed proposal/agreements	-

# World Mangrove Center

Inisiasi Indonesia dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui kerja sama Forest Program VI Protection of Mangrove Forest, **Membangun World Mangrove Center (WMC)**

Telah diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, pada 10 Juni 2022

**“Hub Internasional”** untuk menyediakan akses data dan informasi best practices pengelolaan mangrove, penelitian dan pengembangan ekosistem mangrove, upaya rehabilitasi, konservasi mangrove, pengelolaan berbasis sains dan SI

Menjadi pusat kerjasama internasional yang mempromosikan pengelolaan mangrove berkelanjutan dengan menghubungkan, mengkoordinasikan, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lintas negara

# PERAN STRATEGIS WMC



Pengembangan jaringan nasional dan internasional dalam pengelolaan ekosistem mangrove



Koordinasikan kegiatan inventarisasi, konservasi dan rehabilitasi mangrove



Pusat informasi mangrove global



Dialog kebijakan



Dokumentasi praktik terbaik pengelolaan mangrove



Fasilitasi kemitraan spin-off untuk membangun pilot percontohan dan scale-up

# Perkembangan saat ini

## Muncul berbagai mangrove center :

1. Mangrove Information Center : Bali
2. The Mohammed bin Zayed International Mangrove Research Center Bangka Belitung
3. Taman Mangrove Teluk Balikpapan → BSI berkontribusi pengembangan area untuk riset dan ujicoba untuk perumusan SI
4. Pusat–pusat mangrove yang tersebar di bbrp daerah di Indonesia yang dikembangkan oleh Wetlands dan KKP : 18 (pembibitan dan riset)



### Lokasi Yayasan Lahan Basah Indonesia (Wetlands):

1. Mangrove Center Reroroja, NTT
2. Hutan Mangrove Lestari Karangsong, Jawa Barat
3. Hutan Mangrove, Bali
4. Hutan Mangrove Kariangau, Kaltim
5. Hutan Mangrove Margomulyo Balikpapan, Kaltim
6. Hutan Mangrove TN. Sembilang, Sumsel
7. Mangrove Centre Tuban, Jatim
8. Mangrove Bintan, Kepri
9. Hutan Mangrove TN. Ujung Kulon, Banten
10. Mangrove Centre Akademi Perikanan Sidoarjo, Jatim

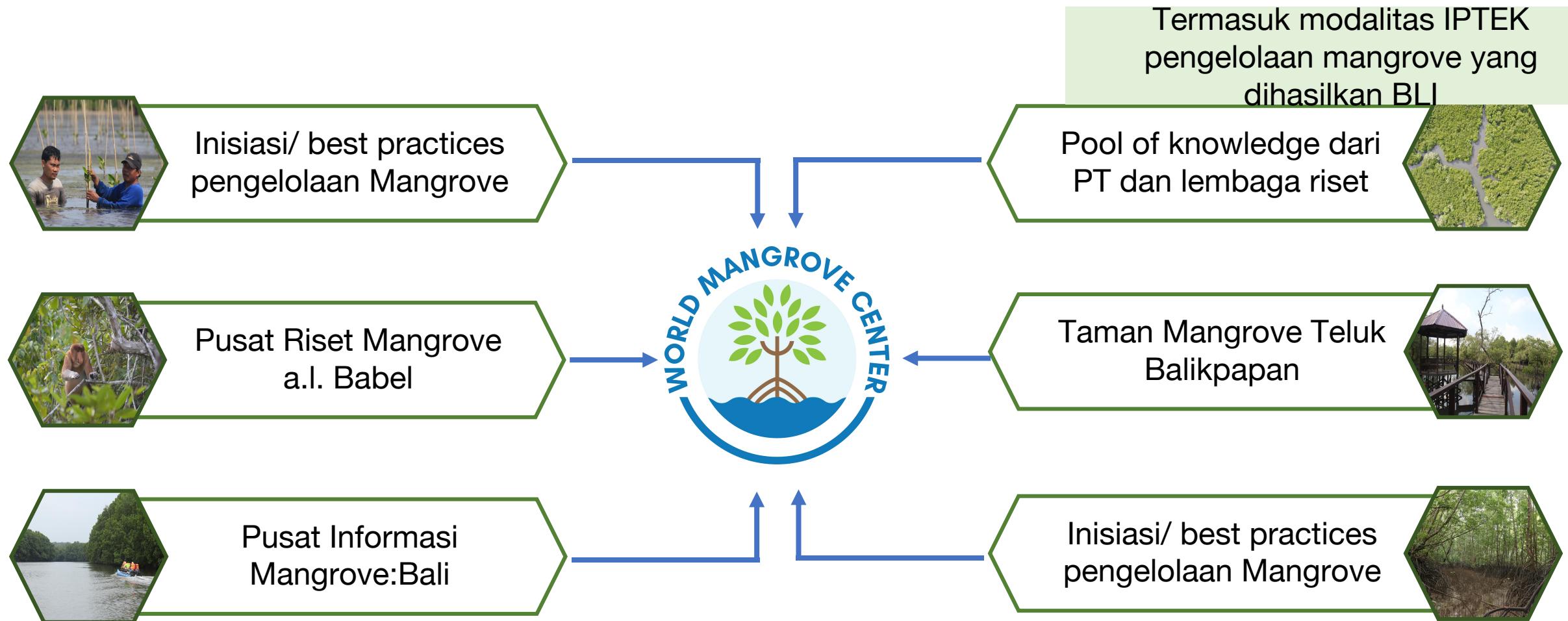
11. Hutan Mangrove Tarakan, Kaltara
12. Hutan Mangrove Kuala Langsa, Aceh
13. Ekowisata Mangrove Bedul Banyuwangi, Jatim
14. Mangrove Muara Gembong, Jawa Barat
15. Mangrove Muara Angke, DKI Jakarta
16. Ekowisata Mangrove Mangunharjo, Jawa Tengah

### Lokasi KKP:

1. Kab Aceh Jaya
2. Kab Asahan
3. Kab Lampung Timur
4. Kab Serang
5. Kab Indramayu
6. Kab Rembang
7. Kab Pasuruan
8. Kab Mempawah
9. Kab Lombok Barat
10. Kab Sumenep
11. Kab Donggala
12. Kab Bengkalis

Sumber: paparan KemenkoMarves, 2 Agustus 2022-Babel

# Konsep awal: WMC Sebagai “Hub” Informasi dari Pusat-Pusat Mangrove





4

REKOMENDASI *WORLD MANGROVE  
CENTER*

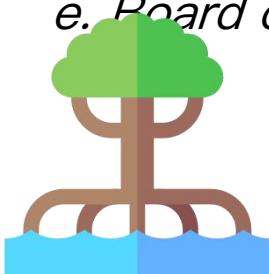
# Rekomendasi Pembangunan World Mangrove Center



Kelembagaan WMC direkomendasikan dalam bentuk organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional

Perlu dibentuk Pokja untuk menyiapkan konsep:

- a. bentuk kelembagaan
- b. rancangan skema skema kontribusi tiap anggota WMC baik berupa kontribusi finansial dan non-finansial
- c. pengaturan hak dan kewajiban setiap anggota
- d. peran-peran penting posisi Indonesia sebagai *host country*
- e. *Board of Trustees* (Dewan Penyantun) sebagai penentu kebijakan tertinggi organisasi



Penyiapan konsep tersebut mempertimbangkan aspek filosofis konsep pembentukannya, arah dan tujuan yang ingin dicapai, mempertimbangkan luasan kerja dan wewenangnya, kepentingan dan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, sistem keanggotaan, analisis biaya manfaat, serta aspek lain yang dapat digali melalui proses konsultasi dengan para pihak.

Perlu disusun kertas kerja (*concept note*) terkait pentingnya pendirian WMC yang digagas oleh pemerintah Indonesia ini sebagai bahan dalam memproduksi berbagai materi komunikasi bagi upaya penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dari dalam dan luar negeri.



# TERIMA KASIH



BSILHK



BSILHK



BSILHK



BSILHK

[bsilhk.menlhk.go.id](http://bsilhk.menlhk.go.id)